



PRESENTER NAME



Rapat Koordinasi Persiapan Perumusan Data Terpadu Kelurahan Dalam Rangka Mwujudkan Cinta Statistik dan Pengembangan Madiun Citizen Master

16 JUNI 2022





LATAR BELAKANG



SALINAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2019
TENTANG
SATU DATA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
 - bahwa untuk memperoleh Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola Data yang dihasilkan oleh pemerintah melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
 - bahwa selama ini belum ada ketentuan yang mengatur mengenai Satu Data Indonesia;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia;

Pasal 12 ayat (5),

- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Dewan Pengarah diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional selaku Ketua Dewan Pengarah.

Pasal 16 ayat (7),

- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional selaku Ketua Dewan Pengarah.

Pasal 17 ayat (4),

- Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 31 ayat (2),

- Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri atau Peraturan Badan, sesuai dengan kewenangan selaku anggota Dewan Pengarah.

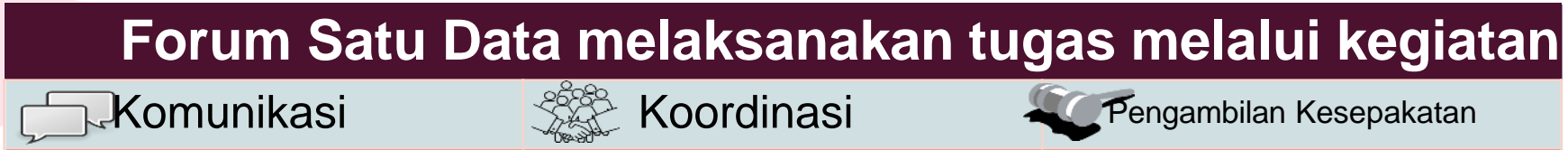


PerPres 39/2019 memberikan amanat kepada Kementerian PPN/Bappenas untuk menyusun



Peraturan Menteri PPN/ Kepala Bappenas tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat

Tujuan Penyelenggaraan Forum Satu Data di Kota Madiun



Penentuan Daftar Data


- Sesuai dengan arsitektur SPBE;
- Kesepakatan Forum Satu Data;
- Rekomendasi Pembina Data;


Penentuan Data Prioritas


- Prioritas Pembangunan Kota Madiun;
- Program Strategis Nasional;
- Major Project dalam RPJMN & RKP;
- **Arahan Walikota Madiun (Mendesak).**

Penentuan Rencana Aksi

- pengembangan SDM kompeten;
- penyusunan juknis pelaksanaan Satu Data;
- kegiatan terkait pengumpulan Data;
- kegiatan terkait penyebaran Data;
- kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.

 Penentuan Kode Referensi dan/atau Data Induk

 Berbagipakai data dan informasi melalui API

 Pembatasan Akses Data Tertentu

! Forum Satu Data Indonesia juga berperan dalam penyelesaian permasalahan tata kelola Data yang terjadi di Indonesia

Data Prioritas dalam Satu Data Indonesia

PRINSIP DATA



Pemerintah Pusat
87 Kementerian/
Lembaga



Pemerintah Daerah
Prov//Kab/Kota/Kec/
Desa/Dusun



Umum

Satu Standar Data

Satu Metadata Baku

Interoperabilitas

Satu Kode Referensi/Data Induk

Pembina Data



KEUANGAN NEGARA
KEMENKEU



STATISTIK - BPS



GEOSPASIAL - BIG

Dikoordinasikan oleh Bappenas

Data Prioritas

Prioritas Nasional

Program Strategis Nasional

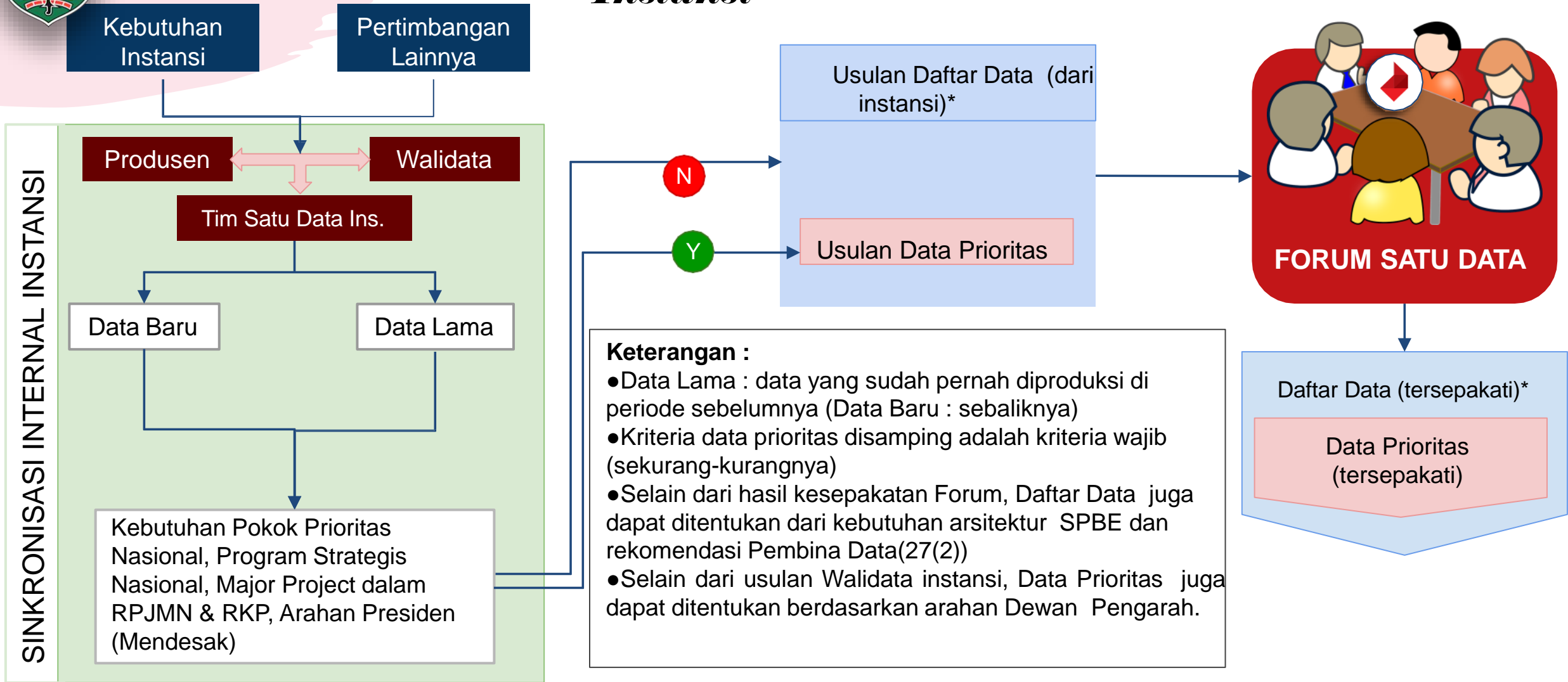
Major Project dalam RPJMN & RKP

Arahan Presiden (Mendesak)



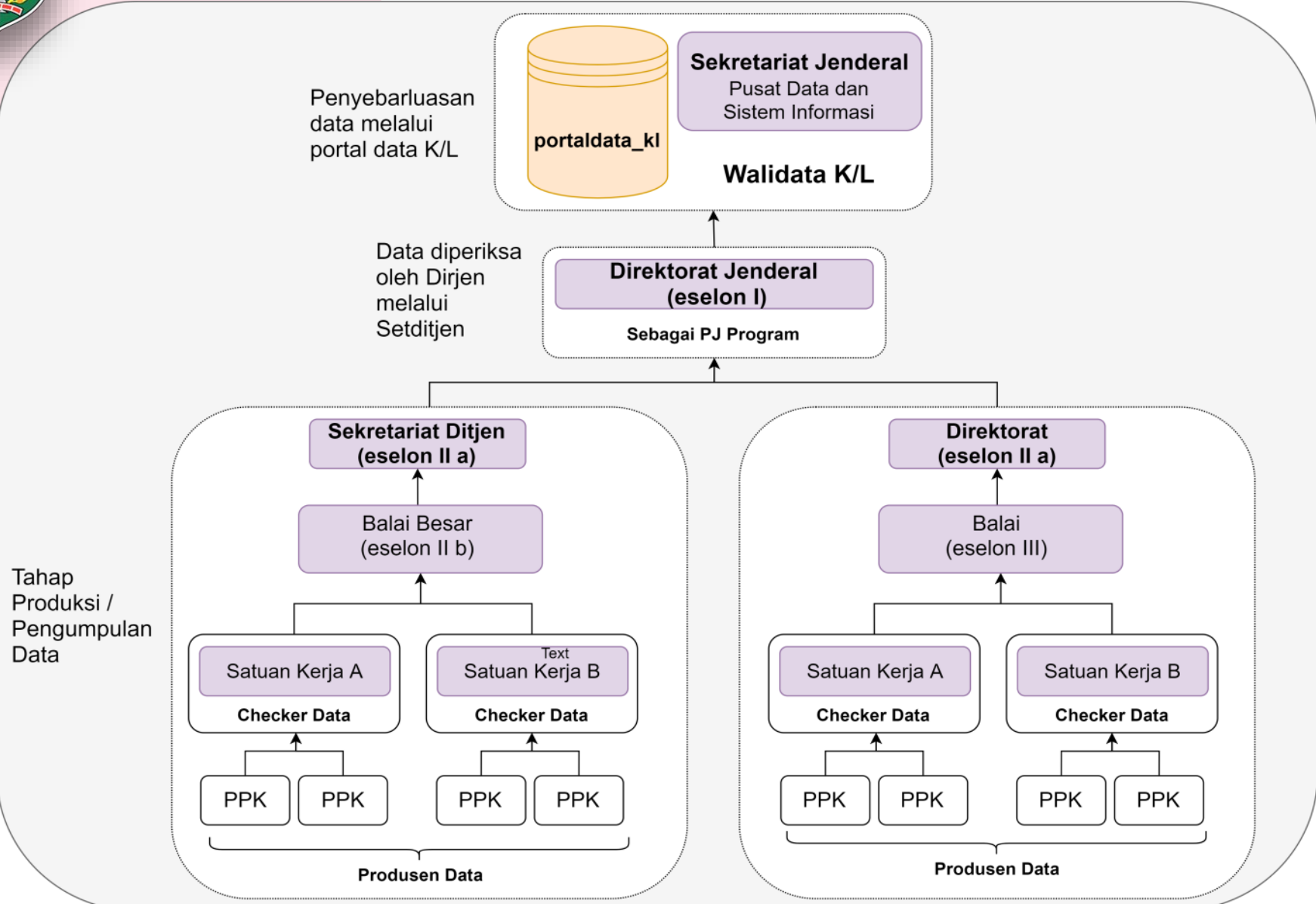
PERENCANAAN DATA

Pengusulan Daftar Data dan Data Prioritas oleh Walidata Instansi





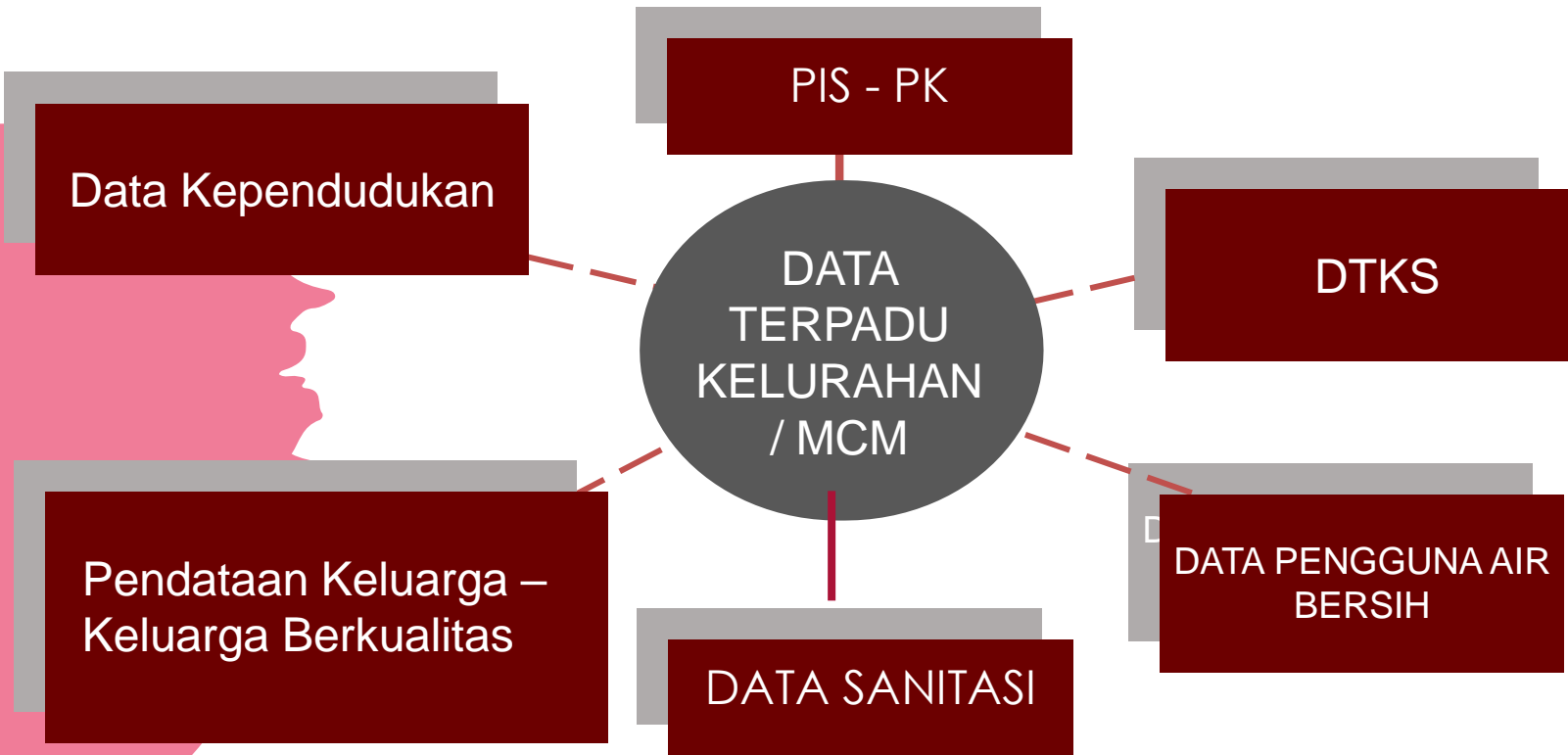
Pengumpulan, Pemeriksaan dan Penyebarluasan Data



Penyelenggaraan data dari produksi/pengumpulan, pemeriksaan, hingga penyebarluasan dilaksanakan dalam **satu** alur dan **satu** proses bisnis, agar meminimumkan silo dan inefisiensi pekerjaan

***NB :**
Unit Pendukung di tingkat pusat adalah satker selain produsen yang berperan penting dalam produksi data (bersifat opsional), sedangkan di tingkat daerah adalah OPD sebagai Walidata pendukung

Rencana Data Terpadu Kelurahan



PROSES INTEGRASI DATA

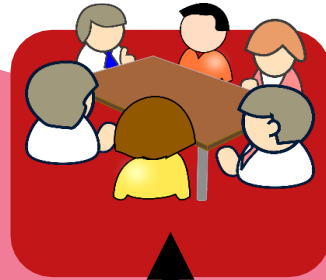
DATA TERPADU
KELURAHAN



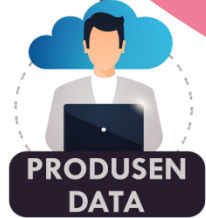
APLIKASI CITIZEN
MASTER



DATA BASE ON
MASYARAKAT



WALIDATA



**PRODUSEN
DATA**

DATA PRIORITAS
DATA NON-PRIORITAS



**PRODUSEN
DATA**

DATA PRIORITAS
DATA NON-PRIORITAS



**PRODUSEN
DATA**

DATA PRIORITAS
DATA NON-PRIORITAS



**PRODUSEN
DATA**

DATA PRIORITAS
DATA NON-PRIORITAS

1. Mengumpulkan data
2. Memeriksa kesesuaian data
3. Mengelola data

1. Menghasilkan data
2. Menyampaikan data dan metadata kepada Walidata



BIG DATA

PERENCANAAN
PEMBANGUNAN



STANDARISASI
DATA

PENENTUAN
TARGET
PRIORITAS

SINERGITAS
PROGRAM
KEGIATAN

**PEMANFAATAN
DATA**



MATUR NUWUN